



ASEAN DAN ISU LAUT CHINA SELATAN

Lisbet*)

Abstrak

Pada KTT ASEAN ke-30, ASEAN telah menetapkan target waktu penyelesaian Kerangka Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan (Code of Conduct in the South China Sea). Penetapan target penyelesaian pada pertengahan tahun 2017 ini merupakan suatu kemajuan yang dicapai ASEAN karena dengan adanya Code of Conduct ini diharapkan nantinya dapat meredakan ketegangan yang terjadi di wilayah Laut China Selatan. Meskipun demikian, perkembangan isu Laut China Selatan ini belum mencapai kemajuan yang signifikan karena sikap ASEAN yang tidak tegas terhadap China, dan hal ini patut disayangkan. Ketidaktegasan ASEAN ini dipengaruhi oleh sikap Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang menghindari konfrontasi dengan China. Untuk menjaga agar situasi di Laut China Selatan tetap kondusif, Indonesia perlu mendorong negara-negara ASEAN agar segera menyelesaikan draf Code of Conduct sesuai target yang ditetapkan.

Pendahuluan

Pada tanggal 26-29 April 2017 di Manila, Filipina, ASEAN telah menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang ke-30. KTT tahun ini merupakan momen penting bagi ASEAN karena tahun ini ASEAN genap berusia 50 tahun. Pada konferensi tersebut, pembahasan lebih banyak difokuskan pada enam bidang, yakni orientasi terhadap rakyat ASEAN, keamanan dan kerja sama maritim, pertumbuhan inovasi yang inklusif, ASEAN sebagai model regionalisme, dan ASEAN sebagai pemain global untuk menyoroti ulang tahun emas ASEAN ke-50.

Pada KTT ini juga dihasilkan Deklarasi ASEAN mengenai Peran Pelayan Publik sebagai Katalisator dalam Mencapai Visi Komunitas ASEAN 2025. Deklarasi ini fokus terhadap layanan publik, terwujudnya ekonomi inklusif, dan terbangunnya kepedulian sosial. Selain menghasilkan Deklarasi ASEAN tersebut, KTT ASEAN ke-30 ini juga membahas mengenai isu-isu besar yang terdapat di kawasan ASEAN, seperti pemberantasan terorisme, Semenanjung Korea, narkoba, dan Laut China Selatan.

Wilayah Laut China Selatan merupakan salah satu jalur perdagangan internasional

*) Peneliti Muda pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: lisbet.sihombing@dpr.go.id



yang sering dilalui kapal-kapal niaga dari berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, masyarakat internasional berkepentingan agar wilayah ini terjaga stabilitasnya dan dalam keadaan aman. Di satu sisi, KTT ASEAN ke-30 mencatat kemajuan dengan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan draf *Code of Conduct in the South China Sea*. Di sisi lain, sikap ASEAN pada KTT ke-30 ini tidak mengalami kemajuan berarti karena ASEAN tidak menyatakan sikap tegas terhadap aktivitas China di wilayah tersebut. Tulisan ini hendak membahas perkembangan terkini ASEAN dalam menyikapi isu Laut China Selatan hingga pelaksanaan KTT ASEAN ke-30.

ASEAN dan Isu Laut China Selatan

Isu sengketa Laut China Selatan merupakan salah satu isu yang sudah lama dibahas dalam setiap pertemuan ASEAN, karena masih belum terdapat solusi damai mengenai persoalan Laut China Selatan yang dapat diterima oleh negara-negara yang bersengketa. Isu ini penting bagi ASEAN karena ASEAN menginginkan adanya kondisi keamanan yang kondusif di kawasan, sehingga ASEAN berkepentingan untuk membantu dalam mencari solusi damai atas persoalan sengketa di wilayah ini agar stabilitas kawasan dapat terjaga.

Dalam kerangka mencari solusi damai atas persoalan ini, ASEAN telah melakukan pendekatan terhadap negara-negara yang terlibat sengketa agar bersedia menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan cara damai, termasuk dengan China. Upaya yang dilakukan oleh ASEAN antara lain, menghasilkan *Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea* pada tanggal 4 November 2002. *Declaration of the Conduct* tidak efektif karena bersifat tidak mengikat negara-negara yang terlibat sengketa. *Declaration of the Conduct* hanya bersifat himbauan agar negara-negara yang terlibat mau patuh terhadap hukum internasional dan norma-norma yang berlaku serta bersedia menyelesaikan persoalan ini secara damai tanpa paksaan maupun ancaman.

Himbauan ASEAN untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah laut China Selatan selalu diserukan dalam setiap KTT ASEAN. Akan tetapi, himbauan ASEAN tersebut tidak mendapat respons

yang cukup, terutama dari China, karena tidak memiliki kekuatan hukum. Kendati demikian, pada KTT ke-29 tahun 2016 di Laos, ASEAN menyatakan sikap tegasnya terhadap China. Pada KTT tahun lalu itu, ASEAN menekankan pentingnya tindakan non-militerisasi dan pengendalian diri dalam melakukan aktivitas di Laut China Selatan, terutama bagi negara-negara yang mengklaim atas wilayah tersebut, termasuk masalah reklamasi lahan. Sikap tegas ASEAN ini disampaikan sebagai reaksi dari tindakan China yang telah melakukan pembangunan pulau buatan serta membangun sistem persenjataan militer di wilayah yang disengketakan. Sikap tegas ASEAN ini pun tidak dihiraukan oleh China yang masih tetap melakukan aktivitas pembangunan di wilayah Laut China Selatan. Menyikapi hal tersebut, pada KTT ASEAN ke-30, ASEAN membuat kemajuan dalam menyikapi persoalan Laut China Selatan, yakni menetapkan target penyelesaian *Code of Conduct in the South China Sea*.

Isu Laut China Selatan di KTT ASEAN ke-30

Pada KTT ASEAN ke-30, ASEAN telah menetapkan target waktu penyelesaian *Code of Conduct in the South China Sea* pada pertengahan tahun 2017. Sejak *Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea* tahun 2002, ASEAN belum memiliki kesepakatan yang dapat dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat sengketa. *Code of Conduct* merupakan upaya ASEAN dalam menyikapi persoalan sengketa teritorial wilayah Laut China Selatan agar para pihak yang bersengketa mematuhi tata berperilaku di Laut China Selatan dengan sungguh-sungguh, yakni berkomitmen untuk menjaga suasana kondusif di wilayah sengketa tersebut. Dengan adanya *Code of Conduct*, seluruh negara yang terlibat sengketa dapat terikat secara hukum untuk mematuhi aturan-aturan sebagaimana yang disepakati bersama. Jika *Code of Conduct* berhasil ditetapkan, hal ini dapat dianggap sebagai kemajuan bagi ASEAN dalam menyikapi persoalan Laut China Selatan.

KTT ke-30 ASEAN juga menghasilkan *Chairman's Statement*, yang di dalamnya memuat keprihatinan beberapa pemimpin ASEAN terhadap adanya aktivitas

pembangunan di wilayah Laut China Selatan. Berdasarkan pernyataan tersebut, secara tidak langsung terlihat bahwa terdapat beberapa pemimpin ASEAN yang menginginkan sikap yang lebih tegas dari ASEAN terhadap tindakan-tindakan China di Laut China Selatan. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan China yang asertif di Laut China Selatan, seperti melakukan penimbunan laut untuk membangun pulau-pulau buatan, landasan pacu, dan menempatkan fasilitas sistem persenjataan militer serta sistem artileri pertahanan udara di Kepulauan Spratly. Tidak hanya itu, China juga telah memperluas tujuh pulau buaatannya di Spratly, termasuk membuat landasan pacu dan instalasi peluncuran rudal. Bahkan, dalam rangka mempertahankan wilayah Laut China Selatan, China berencana untuk menyimpan jet tempurnya di tiga pulau terumbu karang.

Sayangnya keprihatinan beberapa pemimpin ini tidak terakomodasi dengan baik dalam KTT ASEAN ke-30, karena Presiden Filipina Rodrigo Duterte selaku Ketua ASEAN tahun 2017, tidak menghendaki adanya sikap tegas dari ASEAN yang tertuang di dalam *Chairman's Statement*. Bahkan dalam *Chairman's Statement* tersebut juga dinyatakan bahwa telah terdapat peningkatan kerja sama antara ASEAN dengan China. Oleh karena itu, ASEAN perlu menjaga hubungan baiknya dengan China. Sikap ASEAN yang tidak tegas terhadap China dalam persoalan Laut China Selatan tersebut dikarenakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte berusaha membawa ASEAN untuk tidak melakukan konfrontasi dengan China.

Sikap Presiden Duterte ini berbeda dengan sikap Presiden Filipina sebelumnya, Presiden Benigno Aquino, yang bersikap tegas terhadap China dalam menyikapi persoalan Laut China Selatan. Sebenarnya, posisi Filipina justru diuntungkan dengan adanya putusan Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada bulan Juli 2016 lalu, yang memenangkan gugatan Filipina terhadap China atas persoalan Laut China Selatan. Akan tetapi, hal itu sepertinya tidak ingin dimanfaatkan oleh Presiden Duterte.

Sikap tidak tegas Presiden Duterte pada KTT ASEAN ke-30 ini dikarenakan adanya kepentingan Filipina terhadap China. Sebelum pelaksanaan KTT ASEAN ke-30,

China telah menekan Filipina untuk tidak menyebutkan mengenai tindakan-tindakan China dalam pokok pembahasan sidang. China pun menyadari bahwa sejak masa kepemimpinan Presiden Duterte, Filipina menghendaki adanya peningkatan kerja sama dengan China.

Dalam rangka peningkatan kerja sama kedua negara, China telah menyetujui untuk memberikan dana bantuan infrastruktur kepada Filipina dan mengizinkan kapal-kapal Filipina untuk dapat kembali mengambil ikan di *Scarborough Shoal*, sebuah pulau karang yang diklaim oleh Filipina di wilayah Laut China Selatan. Pulau karang ini kaya akan sumber daya perikanan dan telah menjadi sengketa antara Filipina dan China selama 4 tahun.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pada KTT ASEAN ke-30, ASEAN telah berhasil membuat kemajuan dalam merespons isu Laut China Selatan. Kemajuan ini ditandai dengan adanya keinginan ASEAN untuk menyelesaikan target penyusunan draf *Code of Conduct in the South China Sea* pada pertengahan tahun 2017 ini.

Namun hal itu tidaklah cukup, karena ASEAN tidak bersikap tegas terhadap tindakan-tindakan China di wilayah Laut China Selatan yang selama ini telah membangun pulau-pulau buatan dan melakukan aktivitas militernya. Tindakan China ini telah meningkatkan ketegangan di antara negara-negara yang terlibat sengketa. Hal itu seakan menandakan bahwa China tidak mematuhi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam *Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea*, padahal ASEAN dan China sudah sepakat untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah Laut China Selatan.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang berpengaruh perlu mengajak negara-negara ASEAN yang terlibat sengketa di wilayah Laut China Selatan untuk tetap bersedia menyelesaikan sengketa tersebut melalui dialog. Ajakan ini diperlukan, karena tindakan China tersebut telah menimbulkan ketegangan di wilayah Laut China Selatan.

Setelah KTT ASEAN ke-30, Indonesia perlu mendorong seluruh negara-negara yang terlibat sengketa untuk berkomitmen

menyelesaikan draf *Code of Conduct* tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Hal ini penting karena pembahasan draf *Code of Conduct in the South China Sea* ini tidak mudah. Setiap negara yang terlibat sengketa pasti menginginkan agar kepentingan negaranya dapat diakomodasi dalam *Code of Conduct*. Oleh karena itu *Code of Conduct* menjadi penting karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga harus dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat sengketa.

Dengan selesainya penyusunan draf *Code of Conduct*, diharapkan seluruh negara yang terlibat sengketa bersedia mematuhi aturan tersebut sehingga stabilitas keamanan kawasan pun dapat terjaga dengan baik. Keuntungan lain yang diperoleh dengan stabilitas kondisi keamanan di wilayah Laut China Selatan adalah negara-negara ASEAN yang wilayahnya berdekatan dengan Laut China Selatan juga akan mendapatkan manfaat dari jalur lalu-lintas perdagangan di wilayah tersebut.

Referensi

- Abbugao, Martin dan Aye Macaraig. "Hague Ruling Not Mentioned: Absent China Gains from Watered Down ASEAN Chairman Statement", <http://www.philstar.com/headlines/2017/04/29/1695088/hague-ruling-not-mentioned-absent-china-gains-watered-down-asean>, diakses 3 Mei 2017.
- "ASEAN Diserukan Jadi Solusi Dunia", *Republika*, 30 April 2017, hlm 1.
- "ASEAN Harus Beri Efek Positif", *Kompas*, 30 April 2017, hlm 1.
- "China Tegaskan Klaim Wilayah Laut China Selatan yang Masih Jadi Sengketa", <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38730199>, diakses 4 Mei 2017.
- "China Welcomes ASEAN Summit Declaration on South China Sea", <http://www.voanews.com/a/china-welcomes-asean-south-china-sea-declaration/3834140.html> 8 mei 2017, diakses 8 Mei 2017.
- Dikarma, Kamran. (2017). "ASEAN Moderat Soal Laut China Selatan", *Republika*, 2 Mei 2017, hlm 7.
- "Indonesia jadi Penopang", *Kompas*, 4 Mei 2017, hlm 20.
- Nuraeni, Deasy Silvy, Arifin Sudirman. (2010). *Regionalisme: Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- "Philippines abruptly drops South China Sea mentions from ASEAN statement", <http://www.foxnews.com/world/2017/04/30/philippines-abruptly-drops-south-china-sea-mentions-in-asean-statement.html>, diakses 8 mei 2017.
- Saputri, Dessy Suciati. (2017). "Jokowi Hadiri KTT ASEAN ke-30", *Republika*, 29 April 2017, hlm 8.
- Severino, Rodolfo C. (2008). *ASEAN: Southeast Asia Background Series No. 10*. Singapura: ISEAS Publications.
- "Soft "ASEAN Way" on China Explained", <https://www.pressreader.com/philippines/philippine-daily-inquirer/20170429/281517931015743>, diakses 9 Mei 2017.
- "Soft on Regional Issues? That's the Asean Way", <http://globalnation.inquirer.net/155665/soft-regional-issues-thats-asean-way>, diakses 9 Mei 2017.
- Tay, Simon. SC, Jesus Estanislao, Hadi Soesastro (ed). (2000). *A New ASEAN in A New Millenium*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Wicaksana, I Gede Wahyu. (2017). "Indonesia dan ASEAN", *Media Indonesia*, 29 April 2017, hlm 6.